



## Banpol 2019 Disalurkan Dua Tahap

UMBULHARJO (MERAPI) - Bantuan keuangan untuk partai politik (banpol) yang memiliki kursi di DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2019 rencananya diberikan dua tahap. Mengingat tahun ini akan dilaksanakan Pemilu legislatif pada 17 April 2019. Namun kepastian besaran di tiap tahap akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Rencananya diberikan dua tahap. Tahap satu mengacu perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif sebelum. Tahap kedua setelah Pemilu 2019 karena dimungkinkan parpol yang mendapat kursi di DPRD berubah," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogyakarta Zenni Lingga, Minggu (10/3).

Dia menegaskan partai politik (parpol) yang berhak mendapatkan bantuan keuangan politik adalah yang memiliki kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Kini ada 8 parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Yogyakarta dan berhak mendapat bantuan keuangan politik yakni PDIP, PAN, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PPP dan NasDem.

Bantuan keuangan politik yang diterima setiap parpol berbeda karena sesuai aturan berdasarkan pada jumlah suara yang diperoleh parpol pada Pemilu Legislatif 2014. Pada tahun 2018 mengacu peraturan pemerintah pusat, satu suara sah parpol dihargai senilai Rp 3.446. Tahun lalu Pemkot Yogyakarta mengalokasikan sekitar Rp 3,6 miliar untuk

total bantuan keuangan parpol.

"Alokasi bantuan keuangan parpol tahun ini tidak jauh beda dengan tahun lalu karena dimungkinkan nilai bantuan satu suara tetap sama. Tinggal mengalikan jumlah surat suara yang diperoleh partai politik," ucapnya.

Dia menyatakan untuk pencairan bantuan keuangan politik itu syaratnya harus melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini seluruh parpol di DPRD Kota Yogyakarta, lanjutnya, sudah menyerahkan laporan itu ke instansinya.

"Kami minta tertib administrasi maksimal satu bulan setelah tutup anggaran laporan harus diserahkan. Dan semua parpol sudah menyerahkan," tambah Zenni.

Kepala Seksi Pembinaan Kantor Kesbang Kota Yogyakarta Laksmi Prahani menambahkan masih akan berkonsultasi dengan Kemendagri terkait nilai bantuan keuangan politik dan pembagian besaran yang diberikan di tahap satu dan dua. Dimungkinan bantuan keuangan politik itu tidak diberikan secara penuh karena dibagi dua tahap.

"Yang jelas rencananya diberikan dalam dua tahap. Tahap satu dan dua berapa besarnya masih akan kami konsultasikan ke Kemendagri. Termasuk nilai satu suara sah apakah berubah atau tidak," tandas Hani.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005